



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29. Jakarta 10560
Telepon : (021) 4261088 Faksimile : (021) 4243933
Laman : <https://www.litbang.kemkes.go.id> ; Surat Elektronik : sekretariat.bkpk@kemkes.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/2495/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi publik secara efektif dan efisien di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPID BKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari PPID Pelaksana, PPID Pembantu, Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi, Petugas Layanan Informasi, Petugas Layanan Dokumentasi mempunyai tugas:

a. PPID Pelaksana

1. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan informasi publik;
2. melakukan koordinasi dalam penyediaan, penyimpanan dan pendokumentasian serta diseminasi pelayanan informasi publik;
3. mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Atasan PPID;
4. menyusun laporan tahunan pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Atasan PPID; dan
5. memberikan pengesahan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

b. PPID Pembantu

1. menyampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) satuan kerja kepada PPID Pelaksana; dan
2. mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan satuan kerja kepada PPID Pelaksana.

c. Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana serta sistem informasi PPID;
2. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
3. menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik secara berkala, serta merta dan setiap saat;
4. menyelenggarakan fungsi layanan informasi publik termasuk kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP), maklumat pelayanan, standar layanan, jadwal petugas, formulir, dan buku registrasi; dan
5. menyusun laporan layanan informasi publik kepada PPID Pelaksana dengan tembusan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan sebagai PPID Utama.

d. Petugas Layanan Informasi

1. mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumen publik;
2. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, serta melaksanakan tugas administrasi dalam memberikan layanan informasi publik; dan
3. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu terkait dengan permohonan informasi masyarakat.

e. Petugas Pelayanan Dokumentasi

1. menyediakan dokumen referensi dalam memberikan jawaban atas permohonan informasi; dan
2. melakukan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan jenis dan masa retensi berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID BKPK bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KEEMPAT : Masa kerja PPID BKPK sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

KELIMA : Pendanaan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 April 2023

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN



SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/2495/2023
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

- I. PPID Pelaksana : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. PPID Pembantu : 1. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
2. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
3. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
4. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- III. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi : Ketua Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi
- IV. Petugas Layanan Informasi : 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
2. Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
3. Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
4. Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

5. Fachrudin Ali Ahmad, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6. Utami Dyah Respati, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
7. Evi Suryani, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
8. Dian Widiati, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
9. Ripsidasiona, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
10. Faza Nur Wulandari, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
11. Ahdiyat Firmana, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
12. Kurniatun Karomah, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
13. Nisa Fitriyani, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
14. Eni Yuwarni, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
15. Andi Rahmawati, Pranata Humas Ahli Muda, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
16. Yuliana, Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

17. Irwan Fazar Wibowo, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
18. Galih Ajeng Kencana Ayu, Pranata Humas Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
19. Marta Hadisyah Putra, Analis Hubungan Masyarakat, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
20. Sugianto, Analis Hubungan Masyarakat, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
21. Nilasari Muti Widyaningsih, Analis Hubungan Masyarakat, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
22. Muhammad Noer Ibtidail Muharrom, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
23. Wirayuda Suhendra, Arsiparis Ahli Muda, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
24. Muhammad Fadli, Pranata Teknologi Informasi Komputer, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

- V. Petugas Layanan : 1. Tetrian Widyanto, Pranata Komputer Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Isminah, Arsiparis Ahli Madya, Pranata Komputer Ahli Muda, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 3. Sonthy Yulianty, Arsiparis Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

4. Dini Resmisari, Arsiparis, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
5. Endang Mustofa, Arsiparis, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
6. Ina Sumiati, Arsiparis, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
7. Bayu Widyo Sasongko, Pranata Komputer Ahli Muda, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
8. Merly Indira, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
9. Siti Luksitasari, Arsiparis Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
10. Reza Ginanjar, Pengelola Data, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA